

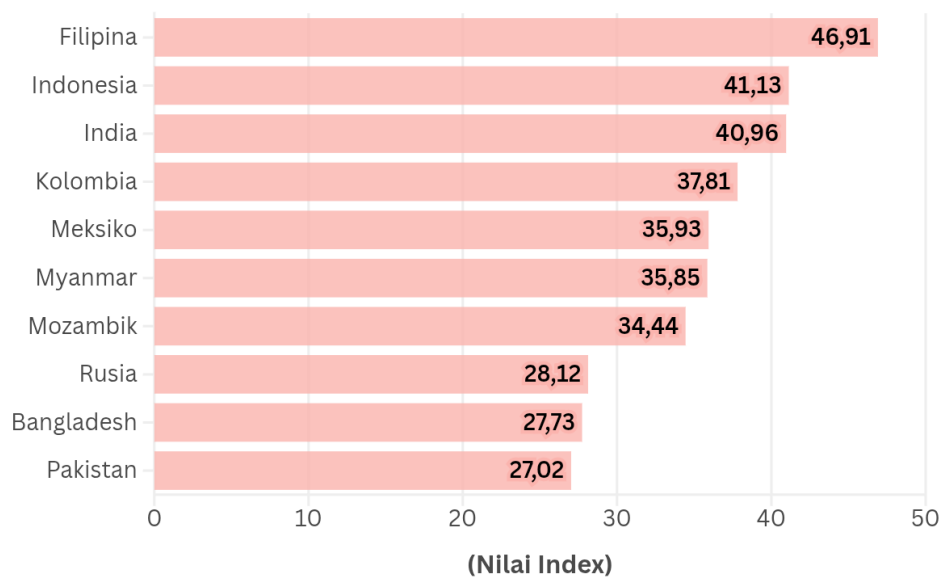
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan hadir dengan kompleksitas geografis dan geologis. Hal ini menandakan bahwa terdapatnya tantangan yang signifikan pada potensi alam yang akan terjadi. Data World Risk Report melalui GoodStats per tahun 2024 (Gambar 1.1), menunjukkan bahwa Indonesia diposisikan sebagai negara kedua tertinggi dengan indeks risiko 41,13 di dunia (Sinta, 2025). Hal ini menggarisbawahi bahwa Indonesia menjadi negara yang sering dilanda permasalahan bencana alam.

Negara dengan Risiko Bencana Alam Tertinggi (2024)



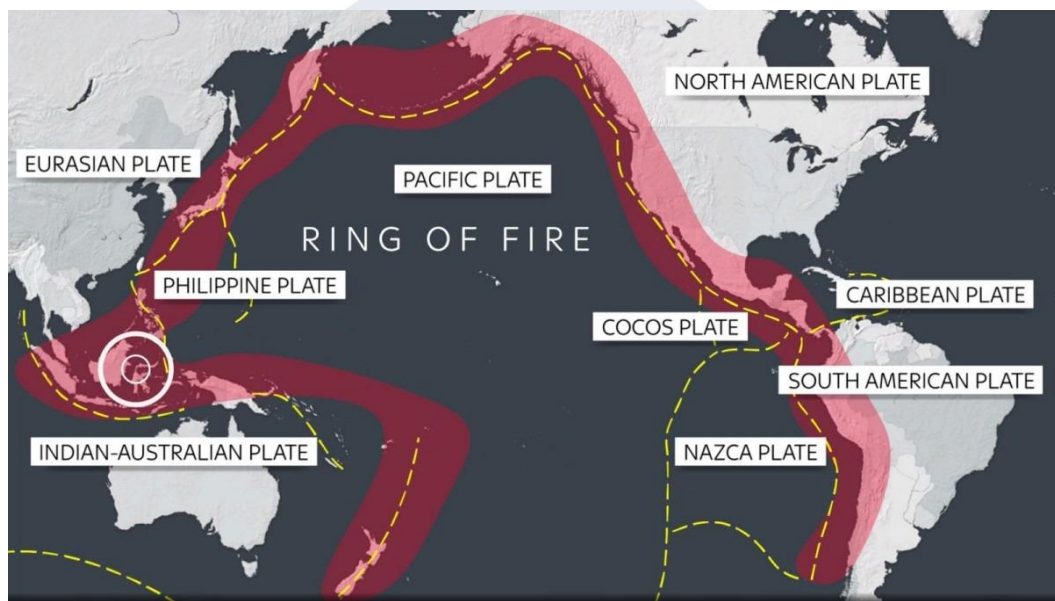
Sumber: World Risk Report

GoodStats

Gambar 1.1 Jumlah Bencana Alam di Indonesia

Sumber: (Sinta, 2025).

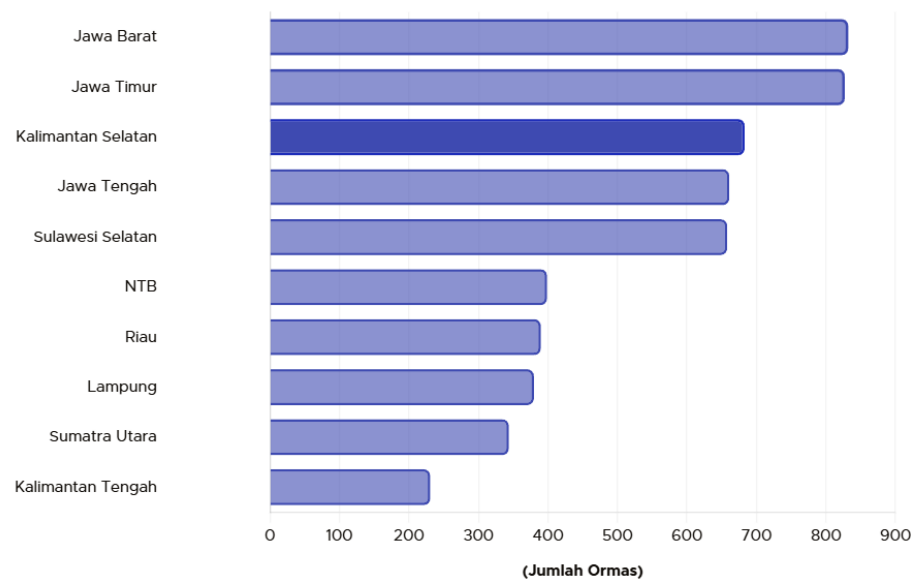
Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada zona *ring of fire* (Gambar 1.2) tidak hanya dihadapkan dengan intensitas ancaman geologis yang tinggi, tetapi memerlukan ketangguhan dan pemahaman masyarakat pesisir akan potensi risiko bencana (Wisner et al., 2012). Bentuk penguatan dan restrukturisasi secara komprehensif diperlukan dengan menghadirkan lembaga penanggulangan bencana.



Gambar 1.2 *Ring of Fire* Indonesia

Sumber: (ITS, 2025)

Berdasarkan data yang diambil dari GoodStats, jumlah organisasi kemasyarakatan atau LSM yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7.808 organisasi, yang berarti terjadi penurunan sekitar 24,26% dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 10.310 organisasi (Gambar 1.3). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat 10.033 organisasi, jumlah tersebut juga menurun sekitar 22,17%, sehingga menggambarkan tren penurunan pendaftaran ormas dalam tiga tahun terakhir (Yonatan, 2025). Namun, organisasi ini tetap hadir dengan jumlah seperti yang sudah disebutkan, dengan visi dan misi masing-masing.



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

GoodStats

Gambar 1.3 Provinsi dengan Jumlah Ormas/LSM Teraftar di Bakesbangpol

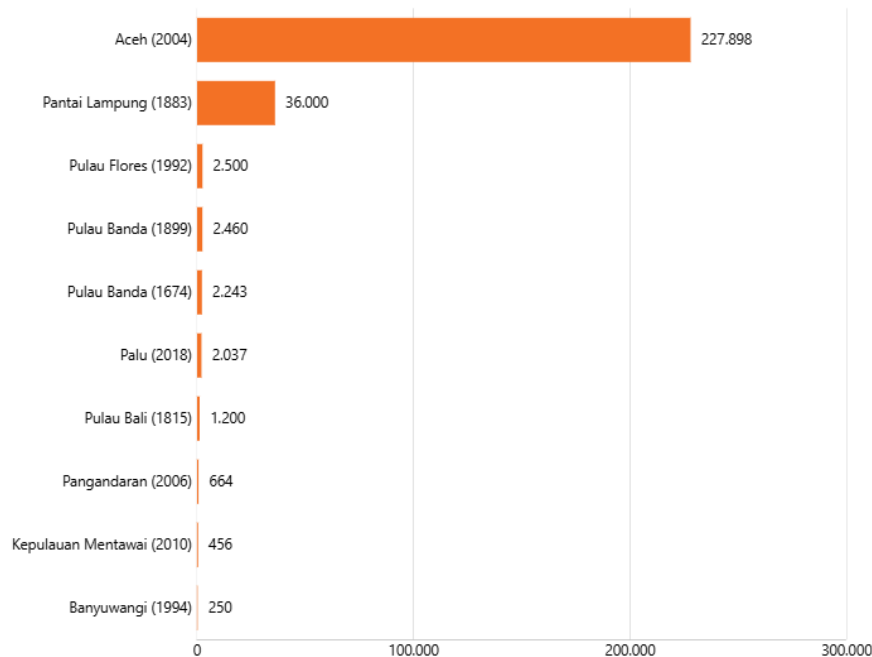
Sumber: (Yonatan, 2025).

Sektor LSM di Indonesia yang bergerak dalam bidang mitigasi bencana, memiliki peran yang sangat vital dalam penguatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana. Dalam praktiknya, berbagai program mitigasi dan edukasi kebencanaan telah dilaksanakan oleh berbagai LSM dalam upaya mediasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan informasi, kebutuhan aspiratif, serta langkah mitigasi kebencanaan yang efektif (Yonatan, 2025).

Mekanisme pengawasan terhadap implementasi sistem penanggulangan bencana telah diposisikan sebagai mandat penting bagi LSM, sehingga kualitas kelola kebencanaan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara keberlanjutan. Dengan demikian, keberadaan LSM yang berfokus pada mitigasi bencana dianggap memperkaya struktur *civil society* dengan kontribusi mereka pada penguatan partisipasi masyarakat sebagai inisiatif pengurangan risiko bencana (Yonatan, 2025).

Peristiwa tsunami Aceh pada tahun 2004 (Gambar 1.4) menjadi catatan penting bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai

insiden yang telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan jumlahnya, tercatat sebanyak 227.898 korban jiwa yang meninggal dunia (Dihni, 2021). Hal ini menjadikan peristiwa tsunami Aceh sebagai salah satu peristiwa yang memilukan untuk dilihat kembali.



Gambar 1.4 Jumlah Korban Jiwa Tsunami

Sumber: (Dihni, 2021).

Peristiwa Aceh juga berpotensi sama terjadinya di wilayah pesisir selatan pulau Jawa, yaitu Lebak Selatan menjadi kawasan yang rawan terhadap ancaman *megathrust* karena termasuk ke dalam *seismic gap* yang belum mengalami gempa besar selama puluhan hingga ratusan tahun terakhir, dan berpotensi menjadi sumber gempa terbesar berikutnya (CNBC Indonesia, 2025).

Berbagai penelitian yang membahas mengenai tingkat kesiapsiagaan bencana di wilayah pesisir Indonesia telah menunjukkan bahwa masyarakat setempat dihadapkan dengan tantangan multidimensional yang mencakup keterbatasan infrastruktur evakuasi, rendahnya tingkat literasi terhadap ancaman bencana, dan minimnya efektivitas sistem peringatan dini (Muhari et al., 2018).

Komunikasi krisis dan risiko bencana, telah diposisikan sebagai bidang penelitian yang semakin penting dalam dua dekade akhir ini. Dalam konteks komunikasi risiko tsunami, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa terdapatnya proses penyampaian informasi yang masih dihadapkan dengan tantangan implementatif pada informasi peringatan dini ataupun edukasi kepada khalayak (Rafliana et al., 2022).

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) berawal dari inisiatif warga Desa Panggarangan pada 13 Oktober 2020. Hadirnya komunitas pada saat itu, berlandaskan pada kepedulian kolektif yang memahami bahwa adanya potensi bencana di wilayah pesisir selatan (GMLS, 2025). Keberadaan GMLS menjadi contoh penting dari inisiatif warga dalam membangun komunitas yang tangguh bencana secara mandiri dan partisipatif.

GMLS mengimplementasikan berbagai programnya yang terbagi menjadi dua, yaitu *tsunami ready* dan *community resilience* dengan melibatkan berbagai mitra, salah satunya mahasiswa UMN sebagai relawan muda kebencanaan. GMLS aktif dalam ranah komunikasi digital dengan memanfaatkan *website* dan Instagram sebagai kanal publikasi kegiatan edukasi kebencanaan. Keberadaan dua saluran ini menjadi implementasi dari taktik strategis GMLS dalam membangun citra lembaganya yang adaptif dan profesional di ranah humanis (GMLS, 2025).

Dalam laporan magang ini, GMLS melalui aktivitas komunikasi digitalnya tidak hanya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi, melainkan menjadi strategi dari implementasi *media relations*. Hal ini mencakup dari hubungan kerja sama dengan media lokal, penulisan *press release*, penyebaran konten edukatif, dan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan jurnalis dan khalayak.

Sebagai organisasi nirlaba berbasis komunitas, GMLS dipandang memerlukan strategi komunikasi yang efektif guna menunjang pencapaian visi dan misinya. *Media relations* dianggap sebagai komponen yang krusial dalam upaya pembentukan serta pemeliharaan citra positif bagi *stakeholders*, termasuk rakyat, media massa, dan kemitraan. Praktik *media relations* melalui persebaran informasi

mengenai program-program di GMLS dapat dilakukan secara lebih sistematis, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga yang dipercaya dalam bidang kesiapsiagaan bencana tsunami.

Pengelolaan komunikasi oleh GMLS dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti: *website* resmi, media sosial, dan kolaborasi media lokal-nasional. Aktivitas *media relations* yang dijalankan, meliputi: penyusunan siaran pers, bekerja sama dengan media untuk melakukan peliputan program, memfasilitasi kebutuhan institusi, dan berbagai kegiatan lainnya. Implementasi strategi komunikasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi dalam membangun *image* organisasi agar mendapatkan reputasi yang kredibel, keberlanjutan, dan berdampak nyata untuk masyarakat pesisir Lebak Selatan.

Media relations diposisikan sebagai salah satu intrik dalam praktik *public relations*, karena melalui fungsinya melibatkan organisasi dengan media massa dalam mengelola dan membangun hubungan untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi (Wilcox et al., 2015). *Media relations* secara spesifik berfokus pada hubungan antara jurnalis serta memperoleh liputan media, sedangkan *public relations* secara umum mencakup spektrum yang luas, seperti: aktivitas manajemen risiko, komunikasi krisis, dan komunikasi internal (Broom & Sha, 2013).

Wilcox, Cameron, dan Reber (2015) mendefinisikan *media relations* sebagai proses membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan media massa untuk memperoleh pertukaran informasi dengan pemberitaan yang akurat dan positif bagi organisasi. Disesuaikan dengan lanskap organisasi nirlaba, *media relations* dapat menjadi peran vital dalam membangun kesadaran publik, menarik mitra dan relawan, serta membangun kepercayaan sesuai arah organisasi (Kyalo, 2024).

Media relations dipandang sebagai langkah strategis bagi organisasi dalam peningkatan kredibilitasnya melalui penilaian *earned media coverage*, sehingga dapat berpengaruh pada pertumbuhan *image* organisasi. Hal ini dianggap lebih

efisien karena melakukan publikasi secara berbayar dapat membebankan organisasi nirlaba karena berdiri secara independen (Kyalo, 2024). Liputan yang dihasilkan secara organik dapat melegitimasi penerimaan publik terhadap pesan yang disampaikan, sehingga jangkauan meluas dan organisasi dapat memperkenalkan program mereka kepada khalayak melalui pemberitaannya (Lattimore et al., 2012).

Peran *media relations* juga tercermin dalam kapasitasnya dalam membentuk percakapan publik melalui publikasi artikel, wawancara, kutipan narasumber agar organisasi dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang paling kompeten terhadap bidangnya (Wilcox et al., 2015). Selain menjadikan narasi dapat mempengaruhinya, kontribusi *media relations* dapat memperluas jangkauan audiens yang dapat memberikan peningkatan *engagement* digital, sehingga menjangkau kelompok pemangku kepentingan yang baru dan berdampak untuk organisasi dalam melaksanakan kerjasama (Broom & Sha, 2013).

Keputusan penulis untuk memilih GMLS sebagai lokasi praktik kerja magang pada divisi *media relations* didasarkan pada ketertarikannya terhadap kemunculan GMLS sebagai organisasi yang bergerak dalam proyek kemanusiaan. Tidak hanya itu, GMLS telah memperoleh pengakuan positif melalui apresiasi UNESCO, sehingga menandakan kredibilitasnya yang menarik perhatian penulis untuk melaksanakan praktik kerja magangnya. Kehadiran penulis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, sejalan dengan nilai-nilai mitigasi bencana yang diusung GMLS, sehingga citra organisasi (*image*) terbentuk secara konsisten dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memperoleh publisitas yang memadai pada berbagai kanal digital.

Secara keseluruhan, pelaksanaan praktik kerja magang di GMLS telah memungkinkan penerapan teori-teori *media relations* secara aplikatif, meskipun ditemukan adanya perbedaan antara konsep teoritis dengan dinamika praktik di lapangan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pembangunan hubungan dengan media, termasuk bagaimana pendekatan komunikasi yang adaptif diperlukan dalam konteks organisasi berbasis komunitas dan kebencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja

Praktik kerja magang bukan hanya diperlukan sebagai kebutuhan SKS saja, melainkan sebagai bentuk program transisi mahasiswa menuju pengalaman kerja. Aktivitas dari pelaksanaan praktik kerja magang didasarkan pada pengaplikasian konteks dan teori perkuliahan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang lebih mendalam di dunia kerja. Berikut tujuan dari pelaksanaan kerja magang di GMLS, sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis aktivitas *media relations* dalam pengelolaan *image* GMLS
2. Menerapkan teori dan konsep komunikasi yang telah diperoleh selama studi penulis dalam konteks praktik nyata di GMLS
3. Mengembangkan *softskill* dan *hardskill* penulis di bidang *media relations*
4. Meningkatkan jejaring profesional melalui interaksi dan kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal organisasi

1.3 Deskripsi Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja

Bagian ini menjelaskan mengenai rincian pelaksanaan kegiatan magang secara prosedural penulis selama melakukan pengajuan hingga pelaksanaan praktik kerja magang dibawah naungan GMLS.

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja

Kegiatan magang di divisi *media relations* GMLS dilaksanakan selama tiga bulan, sejak September hingga November 2025. Selama total waktu 640 jam, penulis melaksanakan kebutuhan tugasnya secara hybrid. Pada kegiatan *on-site*, penulis berkontribusi selama 30 hari di Lebak Selatan dengan menjadi tim *volunteer* program MARIMBA dan Safari Kampung. Selama di lapangan, penulis bergerak sebagai tim dokumentasi, tim logistik, dan melakukan tugas utama, yaitu *drafting press release*.

Adapun kegiatan *online* yang penulis lakukan adalah memantau WordPress dari *website* GMLS dan berkoordinasi dengan Dayah selaku pembantu dari Abah apabila ada kebutuhan rilis yang ingin dibuat. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan rapat koordinasi melalui Grup WhatsApp untuk memantau progres divisi agar berjalan dengan keterampilan dan teknis yang diharapkan.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja

Sebelum melaksanakan kegiatan magang di GMLS, penulis melewati serangkaian prosedur akademik dan administratif yang telah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Adapun rangkaian tersebut, sebagai berikut:

1) Mengikuti Briefing Persiapan MBKM

Berdasarkan arahan program studi, penulis mengikuti rangkaian briefing sebagai masa orientasi mahasiswa menuju semester baru. Dalam kegiatan ini, penulis diberikan beberapa opsi jalur akademik, yaitu: *Track 2 – Perusahaan*, Skripsi Reguler, dan MBKM bagi mahasiswa 2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam mahasiswa mengenai mekanisme yang perlu dicapai sesuai standar program studi dan kampus.

2) Administrasi Kegiatan Humanity Project

Penulis menghadiri *briefing final project* pada Juni 2025 di Function Hall, Gedung A, UMN. Sebagai tahapan awal kegiatan MBKM, penulis harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan memilih paket program Social Impact Initiative melalui situs resmi my.umn.ac.id. Program tersebut, diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal 90 sks dengan syarat tanpa memiliki nilai D dan E.

3) Pengajuan Formulir MBKM-01

Usai mengambil paket KRS yang sesuai dengan ketentuan kampus, kemudian penulis melakukan pengajuan Formulir MBKM-01 melalui situs prostep.umn.ac.id untuk memperoleh Surat Pengantar Magang dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Prodi akan melakukan pengecekan, validasi, dan memberikan dokumen resmi yang mengesahkan mahasiswa untuk bekerja di tempat magang yang diajukan, yaitu GMLS.

4) Mengikuti Pertemuan Perdana Humanity Project

Setelah mendapatkan surat pengantar dari kampus, penulis kemudian menghadiri forum kegiatan pembekalan Social Impact Initiative. Penempatan dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan dosen. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi tempat permulaan mahasiswa SII agar mempunyai bekal sebelum berangkat ke setiap lokasi khusus. Tempat pelaksanaan berada di ruangan Program Studi Ilmu Komunikasi (Collabo Space).

5) Melengkapi Kebutuhan Administratif Humanity Project

Setelah menempuh berbagai langkah administratif, penulis kemudian memenuhi kebutuhan administratif pelengkap, yakni MBKM-02, MBKM-03, dan MBKM-04. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman pencatatan kegiatan pemagangan, validasi, dan acuan penyusunan laporan.

Serangkaian proses yang sudah disebutkan, merupakan urutan teknis yang penulis lalui sebelum, pada saat, dan selesai dari kegiatan pemagangan di GMLS. Dokumen-dokumen ini, dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebijakan kampus, bentuk disiplin, dan pemenuhan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara dengan pihak GMLS.